eISSN: 2580-7765
pISSN: 2580-6688
Vol. 1 , No. 2, Juli-Desember 2017

PANDANGAN KARYA-KARYA FIKSI ATAS NASIB PEREMPUAN MINANGKABAU KORBAN PEMBERONTAKAN DAERAH/PRRI 1958-1961

DEDI ARSA
Sejarah Islam UIN Imam Bonjol Padang
Email: deddyarsya1987@gmail.com

Diterima: 05 Desember 2017	Direvisi :18 Desember 2017	Diterbitkan: 28 Desember 2017

Abstract

Regional Revolt / PRRI (1958-1961) is an important phase in the history of Indonesia in general as well as the history of West Sumatra in particular. Various humanitarian tragedies occurred during this period, including those affecting women, especially Minangkabau women. It's just that the historians' visions seem ignorant to the fate of women in the turmoil. If history narrows its eyes, the works of fiction actually expose it from the beginning. Using historical methods (heuristics, criticism, interpretation & historiography), through the neo-historical approach, this article examines the processual and structural appearance of fictional works on PRRI: how the works reflect the event and how the works reflecting the fate of women. From this study it is found that the fictional work on PRRI has appeared since 1964 and continues to be written until 2015; both romance/novel and short stories; from diverse backgrounds of authors, both directly and indirectly involved, who are ethnically or otherwise outside of Minangkabau. The images of women's fates in these works of fiction almost have a pattern: Women are victims of male wars, both as victims of rape, abuse, victims of 'deception' as rock and wood.
***Keyword**: PRRI / Regional Revolt, Minangkabau women, fictional view of work*

Abstrak

Pemberontakan Daerah/PRRI (1958-1961) merupakan sebuah fase penting dalam sejarah Indonesia umumnya maupun sejarah Sumatra Barat khususnya. Berbagai tragedi kemanusiaan terjadi sepanjang periode tersebut, termasuk yang menimpa perempuan, terutama perempuan Minangkabau. Hanya saja, penglihatan para sejarawan tampak abai dengan nasib perempuan dalam kemelut itu. Jika sejarah memicingkan mata, karya-karya fiksi justru mendedahkannya sudah sejak awal. Dengan menggunakan metode sejarah (heuristik, kritik, interpretasi & historiografi), melalui pendekatan neo-historism, artikel ini menelaah secara prosesual dan struktural kemunculan karya-karya fiksi tentang PRRI: bagaimana karya-karya itu merefleksikan peristiwa itu dan bagaimana pula karya-karya itu merefleksikan nasib perempuan. Dari penelaahan ini ditemukan bahwa karya fiksi tentang PRRI telah muncul sejak 1964 dan terus ditulis hingga 2015; baik bergenre roman/novel maupun cerita pendek.; dari latar belakang penulis yang juga beragam, baik yang terlibat langsung maupun yang tidak, yang beretnis Minangkabau maupun yang di luar itu. Gambaran-gambaran tentang nasib perempuan dalam karya-karya fiksi tersebut nyaris memiliki satu pola belaka: Perempuan adalah korban dari perang laki-laki, baik sebagai korban perkosaan, korban pelecehan, korban 'penipuan' sebagai ganjal batu maupun kayu.

Kata Kunci : PRRI/Pemberontakan Daerah, perempuan Minangkabau, pandangan karya fiksi

PENDAHULUAN

> *Ketika perang usai dan kaum pemberontak dilumpuhkan, prajurit-prajurit pemenang perang lalu dipulangkan ke Jawa lewat Teluk Bayur. Sementara, perempuan-perempuan dengan perut besar menggelembung melepas mereka yang akan naik kapal. Melambai-lambaikan sapu tangan ke arah pasukan yang akan segera berangkat. Sambil berseru-seru dengan perasaan yang sulit digambarkan: "Mas pendusta, Mas pendusta, ya!"*

Kisah di atas itu anekdot tentang nasib perempuan dalam masa perang PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia). Rusli Marzuki Saria, anggota Brigadir Mobil (Mobrik) masa perang, (yang juga seorang sastrawan ternama Indonesia), menceritakannya dengan geli suatu kali kepada penulis (April 2016, wawancara pribadi). Anton Chekov, sastrawan besar Rusia zaman Uni Soviet masih ada, mungkin benar: "Bahkan tragedi yang paling tragis pun mengandung komedi". Begitu pun halnya yang terjadi pada tragedi PRRI atau yang lebih dikenal sebagai Pemberontakan Daerah (1958-1961) itu, berbagai kisah tragik yang dikandungnya juga bisa menyimpan anekdot di sisi yang lain, diceritakan dengan geli sekalipun terasa pedih dan menyakitkan.

Sepanjang Perang PRRI, memang ada catatan bahwa dari pihak kaum pemberontak telah jatuh korban lebih 22 ribu orang, 4 ribu lebih luka-luka, 8 ribu lebih ditawan, dan hampir 124 ribu menyerah (Audrey Kahin 2008). Namun, entah karena alasan 'malu yang tak dapat dibagi', nyaris tak ada keterangan yang mengumumkan berapa banyak perempuan yang menjadi korban dan bagaimana kisah hidup mereka sebagai korban dalam menghadapi kemelut/huruhara politik itu dicatatkan karya-karya sejarah.

Kajian tentang topik ini menjadi menarik karena tidak saja sepi dari penglihatan para sejarawan, tetapi juga konteksnya mendedahkan parakdoksal yang kompleks; ini berhubungan dengan tempat peristiwa itu berlangsung, tanah Minangkabau, jantung matriarkat yang terbesar dan terkuat di Bumi. Sebab, berbicara tentang perempuan dalam masyarakat Minangkabau bukanlah hal yang mudah. Masalahnya bukan saja sulit, tetapi juga rumit.

Secara normatif, adat Minangkabau memang menempatkan perempuan dalam kedudukan yang sangat terhormat. Hal ini tidak jarang menimbulkan sikap heran para peneliti. "Kasus Minangkabau selalu mengganggu asumsi-asumsi universalistik atas kedudukan perempuan di dunia," tulis Hedler mengutip karya Evelyn Blackwood, *Webs of Power: Women, Kin, and Community in a Sumatran Village*. Ini disebabkan karena kenyataan bahwa budaya Minangkabau disebut matrifokal: walaupun laki-laki bisa menjadi bagian dari kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka, yang menjadi jangkar keluarga adalah ibu (Hedler 2010: 9). Dalam konteks demikian, hanya perempuan yang dapat mewarisi harta pusaka (berupa tanah [sawah atau perladangan], rumah, emas, maupun properti lainnya). Harta pusaka itu, atau disebut juga harta pusaka tinggi (properti komunal), dimaksudkan untuk mereka pergunakan untuk kehidupan sendiri atau untuk garis keturunan mereka. Harta pusaka ini, Kato (2005: 216) menulis: "... dimiliki oleh kelompok keturunan dan diwarisi turun-temurun mengikuti prinsip matrilineal". Jika diteruskan, penjabarannya akan bisa lebih panjang lagi.

Di satu sisi, sistem matrilineal memang selalu dibanggakan sebagai sistem kekerabatan yang menempatkan perempuan pada posisi yang penting dalam keluarga, yaitu sebagai penerus garis keturunan sekaligus penjamin eksistensi dan kontinuitas sebuah keluarga Minangkabau (Hadler 2010). Namun, dalam praktiknya, di tengah suatu kekacauan atau konflik politik semacam perang saudara, posisi perempuan di Minangkabau tetap berada dalam bahaya

dan ancaman sebagaimana perempuan dalam kebudayaan mana pun juga.

Karya-karya sejarah yang berbicara tentang perempuan Minangkabau telah banyak dituli selama satu dekade belakangan. Di antaranya yang cukup penting untuk dicatat adalah karya Zurneli Zubir (2011) dalam *Dari Pingitan Hingga Karier: Perjalanan Tokoh Perempuan Minangkabau Menentang Tradisi*, yang berbicara tentang bagaimana kiprah perempuan Minangkabau bertransformasi sejak masa tradisional hingga memasuki ruang publik setelah Indonesia merdeka. Midawati & Amriah Buang (2014) menulis tentang "Keusahawanan peniaga wanita Minangkabau" yang membicarakan kiprah perempuan Minangkabau di tengah ruang publik juga, yaitu dalam perniagaan. Karya lain yang lebih mutakhir ditulis Selfi Mahat Putri (2015), bertajuk "Perempuan dan Modernitas: Perubahan Adat Perkawinan Minangkabau pada Awal Abad ke-20" yang membahas bagaimana modernitas mempengaruhi tata kehidupan perempuan Minangkabau pada aspek adat perkawinan. Sementara soal-soal perempuan sebagai korban juga telah cukup banyak ditulis, di antaranya yang terpenting adalah karya Yenny Narny (2011), "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Tragedi Nasional tahun 1965/1966 di Sumatra Barat", yang membahas tentang nasib perempuan korban kekerasan (yang terjadi setelah Gestapu) di Sumatra Barat.

Tetapi, karya-karya historiografi yang disebutkan di atas tidak membicarakan tentang nasib perempuan korban Pemberontakan PRRI. Tentang ini, karya yang paling bagus membahas tentang posisi perempuan dalam periode PRRI yang dapat disebutkan di sini baru karya Reni Nuryanti (2009) bertajuk "Hidup di Zaman Bergolak; Perempuan Minangkabau pada Masa Pergolakan Daerah (1956-1961)". Karya ini merupakan tesisnya di Universitas Gajah Mada, yang kemudian dibukukan (2011) dengan judul *Perempuan Berselimut Konflik*. Dari penulis yang sama (2011), juga ada artikel dengan topik yang sama berjudul "Perempuan, Seks, dan Perang: Analisis dalam Pergolakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) (1958-1961)". Ada lagi karya lain yang ditulis

Hanya saja, karya-karya Reni Nuryanti tersebut tampak tidak begitu mempedulikan karya-karya fiksi. Padahal karya fiksi mempunyai tempatnya tersendiri dalam ranah sejarah. Karya-karya fiksi, baik roman/novel, ceritap pendek, maupun puisi merupakan sebuah catatan yang merefleksikan kenyataan dengan cara yang lain (Melani Budianta 2006). Kedudukannya dalam khasanah kesejarahan adalah sebagai fakta mental (*mentifact*) (Kuntowijoyo 2013). Oleh sebab itu, karya-karya fiksi patut diperhitungkan dalam merekonstruksi narasi sejarah.

Maka tulisan ini akan melihat bagaimana perempuan direfleksikan dalam periode perang PRRI melalui lorong-lorong dalam karya fiksi. Bagaimana sejarah perkembangan karya-karya fiksi tentang PRRI: bagaimana karya-karya itu merefleksikan peristiwa PRRI dan bagaimana pula karya-karya itu merefleksikan nasib perempuan dalam konflik tersebut?

METODE PENELITIAN

Tulisan ini adalah karya sejarah dengan spesifikasi tematik sejarah sastra, menelaah perkembangan karya sastra dalam tema tertentu (dalam hal ini tentang Pemberontakan Sumatra). Penyusunannya menggunakan metode penyusunan yang dikenal pada umumnya dalam metode penyusunan sejarah modern (Kuntowijoyo 2003), yaitu meliputi empat tahapan: heuristik berupa pengumpulan bahan/sumber (Gottschalk 1985), kritik sumber berupa kritik intern-ekstern, interpretasi (Garaghan 1984), dan penulisan dalam bentuk historiografi.

Heuristik merupakan tahap pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah (Kuntowijoyo 2003). Untuk penelitian ini, sumber-sumber dikumpulkan

dari berbagai tempat dan kriteria. Sumber-sumber tertulis diperoleh dari Arsip Nasional Jakarta, Perpustakaan Nasional Jakarta, Pusat Dokumentasi dan Informasi Minangkabau (PDIKM) Padangpanjang, dan Badan Arsip Propinsi Sumatera Barat, serta beberapa perpustakaan pribadi. Terdapat sedikit hasil wawancara yang juga dicuplik dalam tulisan ini.

Karya-karya fiksi tentang PRRI yang berhasil dikumpulkan meliputi roman/novel (cerita panjang) maupun cerpen (cerita pendek). Pengarangnya tidak hanya dari yang beretnis Minangkabau, tetapi juga ada pengarang Tapanuli, Riau, dan Jawa. Tidak saja pengarang yang terlibat langsung dengan peristiwa tersebut, tetapi juga dari pengarang generasi yang tidak bersentuhan secara langsung dengan zaman tersebut. Berikut daftarnya yang berhasil dilacak dan dikumpulkan:

No	Judul	Pengarang	Tahun
1	Dari Puncak Bukit Talang	Soewardi Idris	1964
2	Di Luar Dugaan	Soewardi Idris	1964
3	Istri Seorang Sahabat	Soewardi Idris	1964
4	Saraswati si Gadis dalam Sunyi	A.A. Navis	1970
5	Pergolakan	Wildan Yatim	1978
6	Tikam Samurai	Makmur Hendrik	1983
7	"Sang Guru Juki"	A.A. Navis	1990
8	"Si Montok"	A.A. Navis	1990
9	*Ketika Merah Putih Koyak*	Carl Chairul	2001
10	*Ular Keempat*	Gus tf Sakai	2005
11	*Pengantin Subuh*	Zelfeni Wimra	2009
12	*Cerita Cinta Enrico*	Ayu Utami	2012
13	*Rimba-Rimba*	Jhoni Syahputra	2015

Sementara, untuk karya-karya sastra yang dipakai sebagai objek telaah/analisis untuk mencari tahu bagaimana nasib perempuan dalam peristiwa PRRI, tidak semua karya-karya tersebut di atas yang digunakan, hal ini terkait dengan bahwa hanya beberapa karya saja di antaranya yang membicarakan nasib perempuan dengan proporsi yang cukup untuk ditelaah, yang lain-lain tampak mengabaikannya. Berikut karya-karya fiksi ditelaah/dianalisis:

No	Judul	Pengarang	Tahun
1	"Di Luar Dugaan"	Soewardi Idris	1964
2	*Saraswati si Gadis dalam Sunyi*	A.A. Navis	1970
3.	"Sang Guru Juki"	A.A. Navis	1990
4	"Si Montok"	A.A. Navis	1990
5	*Ular Keempat*	Gus tf Sakai	2005

Tahapan kedua adalah kritik sumber, yang dapat dibagi atas kritik ektern dan intern. Kritik ekstern dilakukan untuk mencari otentisitas arsip dan dokumen yang sudah didapatkan. Sedangkan kritik intern dilakukan terhadap isi dokumen yang otentik tersebut untuk mendapat kevalidan data yang dikandungnya (Christhoper Lloyd 1993). Tahap ketiga adalah analisis dan sintesis data. Fakta yang diperoleh lalu dianalisis dengan menggunakan analisis prosesual dan struktural. Analisis prosesual digunakan guna menyusun karya-karya fiksi yang pernah terbit tentang topik ini. Sementara analisis struktural (Kartodirdjo 1993) digunakan untuk menganalisis bagaimana nasib perempuan digambarkan dalam karya-karya fiksi tersebut. Tahap keempat yaitu tahap penulisan laporan. Penulisan berbentuk sejarah-sastra mengenai masa pergolakan daerah dengan objek perempuan Minangkabau.

Pendekatan yang dipakai untuk menelaah karya-karya tersebut adalah pendekatan yang dikenal umumya dalam penelitian sastra dengan konten-konten sosial-historis, yaitu pendekatan *new-historisism*. Dalam pandangan ini, fakta dan fiksi tidak terpisahkan, sastra dan sejarah telah lesap batas; pandangan ini tidak memisahkan karya sastra dengan zamannya. Seperti yang dikatakan salah seorang penganjurnya, Louis A. Montrose, "membaca sastra sama dengan membaca

sejarah, membaca sejarah sama dengan membaca sastra" (Melani Budianta 2006). Dalam perspektif demikian ini, karya sastra terikat-erat dengan pengarangnya, tetapi juga terikat erat dengan konteks atau zamannya. Dengan begitu, artikel ini hendak mencari keterhubungan antara karya sastra dalam konteks ruang-waktu [sejarah].

PEMBAHASAN

1. Hari-Hari di Bulan Februari 1958: Menjelang PRRI

Pada tahun 1957, hubungan antara Sumatra Tengah dengan Pemerintah Pusat memasuki fase yang genting. Hubungan itu putus sama sekali ketika pergolakan daerah meletus tidak lama setelah tahun itu. Banyak sebab yang mendorong kondisi ini berlangung. Mulai dari faktor ekonomi, politik, hingga persoalan di tubuh militer. Memasuki tahun 1950-an, Indonesia sebagai bangsa yang baru merdeka mulai belajar mengatur dirinya sendiri. Berbagai persoalan harus dihadapi bangsa yang baru ini. Setelah beberapa tahun merdeka, keadaan pasca-perang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang berarti, terutama yang paling terasa adalah di bidang ekonomi. Kondisi infrastruktur seperti jalan dan jembatan, serta fasilitas-fasilitas publik lainnya yang hancur akibat perang, nyaris belum tersentuh pembangunan kembali (Mestika Zed, dkk. 1998). Kondisi ini terparah dialami daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan Jakarta. Keadaan ini disinyalir disebabkan karena, pada paro pertama tahun 1950-an itu, Indonesia mengalami kegalauan politik: kabinet jatuh-bangun, desas-desus politik mengancam, dan pertikaian antara elite partai yang seakan tidak terdamaikan. Sampai pertengahan tahun 1950-an, kondisi pasca-perang tampaknya belum menunjukkan perubahan yang berarti (Gusti Asnan 2007).

Sejak saat itu, hubungan pusat-daerah semakin sulit untuk didamaikan. Beberapa ikhtiar untuk mendamaikan konflik pusat dan daerah itu telah beberapa kali dilakukan, baik lewat lobi-lobi pribadi maupun lewat forum terbuka di tingkat nasional. Pada saat yang sama, teror, intimidasi dan fitnah makin tak terkendali. Sejumlah pemimpin terpaksa menyelamatkan diri keluar Jakarta dan bergabung dengan dewan-dewan perjuangan di daerah yang mulai dibentuk dan dipelopori oleh kelompok militer Sumatera Tengah dengan mendirikan Dewan Banteng. Dewan perjuangan juga dibentuk daerah lain: Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Lambung Mangkurat, dan Permesta di Sulawesi (Mestika Zed, dkk. 1998). Dengan pelembagaan gerakan protes menentang Jakarta ini, polarisasi pertentangan pusat dan daerah atau sebaliknya semakin mendekatkan daerah ke jurang perpecahan.

Ketika semua upaya rekonsialisasi mengalami jalan buntu, Dewan Perjuangan (yang terdiri dari gabungan dewan-dewan yang disebut di muka), mengeluarkan semacam *ultimatum* kepada pemerintah pusat pada 10 Februari 1958. Isinya antara lain ialah tuntutan agar Kabinet (Pemerintahan) Djuanda dibubarkan dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden atau Pejabat Presiden; memberikan kesempatan dan bantuan sepenuhnya kepada Hatta dan Sultan Hamengkubuwno IX untuk membentuk *zaken kabinet* (kabinet ahli) sampai pemilu berikutnya; meminta kepada Presiden Soekarno agar bersedia kembali sebagai Presiden Konstitusional dengan membatalkan semua tindakannya yang melanggar konstitusi selama ini. Apabila dalam tempo 5x24 jam Presiden Soekarno dan Kabinet Djuanda tidak mememuhi tuntutan tersebut, maka mereka akan membentuk pemerintahan sendiri yang "terlepas dari kewajiban untuk mentaati pemerintah Jakarta."

Baik pemerintah pusat maupun daerah tidak mau mundur dengan pendirian masin-masing, dan setelah ultimatum itu mencapai tenggat waktu yang ditetapkan, maka pada

tanggal 15 Februari, genderang "perang saudara" segara ditabuh. Hal itu ditandai dengan dibentuknya PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indoensia) lengkap dengan susunan kabinet tandingan Jakarta. Sejak itu, meletuslah apa yang disebut oleh Jakarta sebagai "pemberontakan" PRRI (tetapi sebaliknya para pendukungnya menyebut gerakan mereka sebagai "pergolakan" daerah menentang rezim Jakarta yang inkonstitusional); Mossman menyebutnya Pemberontakan Sumatera karena luasnya skala pemberontakan.

Tentara pusat (APRI) atau "tentara Soekarno" mengerahkan seluruh angkatan perang (darat, laut, udara dan kepolisian). Kekuatan APRI waktu pertama diterjunkan mencapai lebih dari 20.000 pasukan. Mereka umumnya dari Divisi Diponegoro yang dianggap telah disusupi kelompok merah (komunis) (Hadi Soebadio 2002: 95). Langkah pertama yang dilakukan pemerintah pusat untuk menguasai Sumatra Barat adalah dengan mengadakan serangan-serangan terhadap pemancar radio di Padang dan Bukittinggi. Aksi tersebut dimaksudkan untuk membatasi jalur komunikasi PRRI. Kemudian pasukan APRI terus bergerak memasuki Kota Padang melalui jalur utara kota yaitu di Pantai Ulak Karang. Setelah Padang dikuasai, operasi terus dilanjutkan untuk menguasai kota-kota lain.

Detik-detik menjelang tentara Soekarno menyerang Kota Padang dan kota-kota penting Sumatera Tengah lainnya adalah saat-saat genting dan menegangkan. Bayangkanlah kepanikan seperti apa yang dirasakan warga kota ketika lampu-lampu kapal perang Tentara Pusat telah tampak bertebaran di lepas Pantai Barat? Di sisi lain, apakah pula yang berkelebat di benak para perwira militer dan sipil-- 'gembong-gembong' kaum pemberontak, yang telah secara berani menyulut perang dengan Pemerintah Pusat--ketika mengetahui bahwa di luar dugaan mereka tentara Soekarno benar-benar berani menyerbu?

James Mossman (lahir pada 1926), seorang wartawan Inggris yang sengaja datang ke Sumatera Tengah untuk meliput kejadian-kejadian di daerah itu pada masa perang saudara itu. Dia meliput untuk *Daily Mail* dan *Sidney Morning Herald*. Mossman melaporkan tentang detik-detik menjelang terjadi dan menjelang jatuhnya Pemberontakan Sumatera (Antony Reid 2008). Maret 1958, ketika Nasution berhasil mengamankan Medan dan Palembang untuk kepentingan serangan Jakarta, Mossman berangkat dengan pesawat terbang ke Palembang, lalu melanjutkan perjalanan dengan bus menuju markas besar kaum pemberontak di Bukittinggi. Beberapa hari kemudian Mossman telah turun ke Padang meliput keadaan kota itu dan kesiapan kaum pemberontak menghadapi serangan kapal-kapal perang Pemerintah Pusat yang sudah bertebaran di lepas pantai.

Di detik-detik menjelang perang benar-benar meletus, Mossman melaporkan, Padang telah sama sekali 'pudur' ketika malam. Lampu-lampu listrik telah dipadamkan. Setengah penduduk telah mengungsi ke kerabat-kerabat mereka di pedalaman, meninggalkan rumah dalam keadaan tertutup dan terabaikan. Persiapan menghadapi serangan Tentara Pusat sudah terlihat di sana-sini. Di Bandara Tabing bazooka dan ranjau telah dipancangkan untuk menghalangi pendaratan musuh. Dan ketika suatu kali kapal-kapal perang tentara Soekarno melepaskan tembakan ke arah pantai, prajurit-prajurit PRRI membalasnya dengan rentetan tembakan bazooka bertubi-tubi. Seperti di tataran perwira, lapor Mossman, di tataran prajurit rendah pun terlihat semangat bertempur terngah bergelora. Betul saja, beberapa waktu sebelumnya Amerika telah melepas jangkar kapal pemuat senjata di lepas-lepas pantai, mensuplai alat-alat perang dengan berbagai cara ke kantong-kantong kaum pemberontak. Persediaan senjata kaum pemberontak betul-betul melimpah. Sementara di sisi lain prajurit-prajurit PRRI yang setengahnya terdiri dari milisi tentara pelajar dan milisi rakyat--milisi ini betul-betul sudah gatal-gatal tangannya untuk segera

meletuskan senjata. Dapat dibayangkan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah memegang senjata sekali pun kini diberi senjata.

Di tataran elite militer, Mossman mengunjungi beberapa kolonel PRRI dan mewawancarai mereka. Dahlan Jambek di Bukittinggi, Simbolon di Padang dan lalu Padangpanjang. Meskipun Tentara Pusat telah berhasil menguasai kota-kota penting Sumatera di pantai timur, perwira-perwira itu tetap percaya diri bakal melemparkan tentara Nasution "ke laut untuk dimangsa ikan hiu". Para perwira tampaknya sepakat: membiarkan tentara Nasution masuk untuk kemudian membabatnya di darat dengan strategi gerilya yang dulu pernah mereka terapkan ketika menghadapi Belanda. Di tataran elite sipil, Syafruddin Prawiranegara yang diwawancarai Mossman di Bukittinggi menyimpan kepercayaan diri yang sama meskipun tidak seberapi-api perwira-perwira militer. Syafruddin, misalnya, ketika ditanya pendapatnya tentang pasukan Pemerintah Pusat yang telah melingkari Sumatera Tengah, menjawab: "mereka tidak akan bisa melukai kami, Tuhan bersama kami."

Tapi Syafrudin keliru. Para perwira salah perhitungan. Tiga setengah tahun perang berkecamuk di Sumatera Tengah, dan mereka kalah. Kaum pemberontak terjungkang. Harga yang harus dibayarkan mahal sekali. Puluhan ribu pemuda, mahasiswa dan pelajar, tewas. Satu generasi hilang-lenyap. Dan di sisi lain, banyak perempuan di daerah ini 'ternodai'.

2. Karya-Karya Fiksi tentang PRRI, Kisaran 1964-2012

Ingatan akan peristiwa ini terpapar dalam ingatan generasi masa itu dan beberapa generasi setelah itu, lewat karangan yang mereka tulis. Di antara mereka yang tercatat adalah Soewardi Idris (1930-2004), yang bergabung dengan kaum pemberontak selama perang saudara, setelah turun dari hutan, menulis novel *Dari Puncak Bukit Talang* (1964). Soewardi juga menuangkan pengalamannya selama perang itu dalam dua antologi cerpen: *Di Luar Dugaan* (1964) dan *Istri Seorang Sahabat* (1964). Ketiganya diterbitkan penerbit N.V. Nusantara Padang. Karya Soewardi Idris, yang juga wartawan, memang banyak berbicara tentang PRRI. Dia adalah penulis yang terlibat langsung dalam peristiwa itu. Bahkan secara lebih jauh Soewardi dalam karya-karyanya banyak menyoroti sisi buruk prajurit-prajurit PRRI, terutama pada masa-masa menjelang PRRI kalah.

Setelah Soewardi, Ali Akbar Navis adalah termasuk pengarang Sumatera Barat lainnya yang banyak menulis tentang peristiwa ini. Novelnya *Saraswati si Gadis dalam Sunyi* (diterbitkan pertama kali pada tahun 1970), misalnya, adalah satu di antara sedikit novel yang secara khusus menyorot realitas perempuan selama perang saudara ini. Di sisi lain, novel ini juga dianggap telah dengan berani keluar dari pakem resmi historiografi saat itu, yaitu dengan menolak untuk menyebut PRRI sebagai 'pemberontakan' atau 'pembangkangan'. Memang hampir tidak satu pun kata itu ditemukan dalam novel ini. Sementara, dalam *genre* lain, A.A. Navis juga menulis setidak-tidaknya 11 cerita pendek yang berbicara tentang PRRI. Cerpen-cerpen tersebut tersebar dalam beberapa kumpulan seperti *Hujan Panas* (1964), *Hujan Panas dan Kabut Musim* (1990), *Dua Kelamin Midin: Cerpen Kompas Pilihan 1970-1980*, *Pistol Perdamaian: Cerpen Pilihan Kompas 1996*, dan *Karya Lengkap AA. Navis (2008)*

Di masa setelah Navis, ada pengarang lain yang cukup intens menggarap tema ini. Jika kedua penulis sebelumnya adalah pengarang asal Minangkabau, pengarang berikut ini berdarah Sidempuan. Pada tahun 1978, Wildan Yatim menebitkan novel *Pergolakan*, yang berlatar kampung asalnya itu pada periode pemberontakan. Di samping menulis *Pergolakan*, Wildan Yatim juga menulis beberapa cerpen yang menyinggung tentang kehidupan pada periode pemberontakan PRRI, salah satunya adalah "Saat Orang Berterus Terang".

Di masa kemudian, ada pengarang berdarah Riau-Minangkabau yang menggarap tema ini. Makmur Hendrik menulis *Tikam Samurai* pada tahun 1983. Novel ini diterbitkan pertama kali oleh CV. Pena Emas Padang pada Febuari 1983 dengan harga awal per novelnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Novel ini diterbitkan 12 jilid. Si Bungsu, tokoh utama dalam novel ini, dianggap mewakili bangkitnya superioritas 'orang Minang' pascapemberontakan yang tertindas dan diperhinakan.

Setelah Makmur Hendrik, butuh waktu belasan tahun kemudian untuk kemunculan kembali tema-tema tentang PRRI. Tahun 2005, *Ular Keempat* karya Gus Tf Sakai diterbitkan penerbit Buku Kompas. PRRI memang bukanlah tema sentral dalam novel ini, sebab novel ini lebih banyak berbicara tentang kisruh haji tahun 1970. Hanya saja, peristiwa PRRI ada cukup banyak disinggung sebagai ingatan tokoh utama terhadap masa lalu puaknya, yang mempengaruhi kehidupan sang tokoh lebih jauh setelah peristiwa itu berlalu.

Di tataran pengarang sastra yang datang lebih agak belakangan, yang tidak bersentuhan lansung dengan peristiwa itu karena hidup di zaman setelahnya, tercatan nama-nama pengarang Sumatra Barat yang menggarap tema ini: Ragdi F. Daye dalam *Lelaki Kayu dan Perempuan Bawang* (2010) menulis beberapa cerpen tentang peristiwa PRRI. Beberapa cerpen Zelfeni Wimra dalam *Pengantin Subuh* (2009) juga berlatar periode ini. Pengarang Minangkabau lain, Carl Chairul, menulis novel berjudul *Ketika Merah Putih Terkoyak* (2001), kisah cinta berlatar perang saudara itu; Jhoni Syahputra menulis sisi dramatik pertempuran dengan detail dalam novel *Rimba-Rimba* (2015) Keempat pengarang yang disebutkan ini sama-sama berdarah Minangkabau, dan punya pengalaman pribadi dengan peristiwa tersebut, sekalipun tidak secara langsung sebagaimana pengarang-pengarang pendahulu mereka yang disebutkan sebelumnya. Sementara pengarang yang tidak punya darah Minangkabau, dan tidak pula terkait sama sekali secara pribadi dengan peristiwa ini, ada juga yang menulis tema ini: Ayu Utami menulis *Cerita Cinta Enrico* (2012), sebuah novel, yang berdasar kepada pengalaman suaminya yang merupakan orang Minangkabau.

3. Perempuan dalam Kemelut Pergolakan (Pandangan Fiksi)

Perang menyisakan satu kesimpulan sederhana, bahwa untuk melumpuhkan mental musuh, perempuan mereka terlebih dahulu harus 'dilumpuhkan'. Dalam kasus ini, untuk melumpuhkan mental kaum pemberontak, perempuan mereka harus dinistai. Dalam *Saraswati si Gadis dalam Sunyi* A.A. Navis (1970) mencatatkan bahwa hal itu benar adanya. Perempuan telah menjadi korban 'perang laki-laki'. Tentara pusat (APRI—Angkatan Perang Republik Indonesia) menistai perempuan di hadapan keluarga laki-lakinya sendiri untuk meruntuhkan mental dan menyurutkan dukungan terhadap pasukan PRRI. Saraswati yang remaja, di antaranya, telah menjadi korban pelecehan dan penistaan. Rumah Angahnya dikepung dan digeledah tentara pusat. Saraswati juga turut 'digeledah' di hadapan Angah dan Busra. Seorang prajurit mencoba memperkosanya. "Tangannya diulurkan ke dadaku. Ketika aku mengelak dan hendak menyingkir, aku didesaknya ke dinding. Sehingga aku tergencet dan menjerit-jerit," tulis Navis. Ketika Saraswati yang bisu dan tuli itu melawan, prajurit APRI itu berlaku serupa ini: "…pangkal bedil yang dihantamkan ke kepalaku, hingga aku terjerongkang. Aku berteriak-teriak dan memaki-maki. Kepalaku berdarah dan darahnya mengalir menutupi mataku."

Sementara, dalam *Ular Keempat,* Gus tf Sakai (2005) juga mencatat tentang perempuan yang diperkosa tentara pendudukan. Ibu dan kakak perempuan Janir, misalnya, diperkosa dan dibunuh tentara pusat karena dituduh mempunyai hubungan dengan kaum pemberontak. "Tentara APRI membunuh mamakmu yang dituduh tentara pusat itu mata-mata,

membunuh ibumu yang karena mamakmu dibunuh jadi gelap mata, membunuh ayahmu yang dengan kalap ingin membalas kematian istrinya, membunuh kakak perempuanmu setelah berulang-ulang diperkosa," tulis Gus tf Sakai.

Namun, perlakuan buruk terhadap perempuan di daerah pendudukan itu tidak saja dilakukan Tentara Pusat. Kaum pemberontak pun ada juga yang berlaku demikian kepada 'orang kampungnya' sendiri. Ini dilakukan baik karena keterpaksaan bathiniah terpisah dari istri selama bertahun-tahun atau karena moralitas kaum pemberontak yang terus memang merosot di tengah himpitan beratnya medan gerilya. Pada cerpen "Di Luar Dugaan", karya Soewardi Idris (1964), dicatat, bahwa setelah dua tahun lebih bergerilya di hutan-hutan dan terdesak di mana-mana, kehidupan kaum pemberontak semakin terjepit. Hal ini mengakibatkan perbuatan mereka semakin nekat. Soewardi mencatat bagaimana kaum pemberontak mendatarkan sebuah kampung menjadi abu karena tak mau membantu menyediakan perbekalan. Dalam pada itu, "Anak-anak gadisnya kami seret untuk memuaskan nafsu," tulis Soewardi pula.

"Di Luar Dugaan" sendiri berkisah tentang seorang prajurit PRRI bernama Hadi. Dia bersama pasukannya melakukan pencegatan terhadap sebuah bus yang penuh muatan di Lubuk Silasih. Bus itu dicegat, lalu penumpang dan muatannya diturunkan. Pasukan yang mencegat membariskan penumpang perempuan dan menelanjangi mereka. Bagi prajurit-prajurit itu, perempuan-perempuan itu merupakan "hasil pencegatan yang paling besar, yang membuat anggota gerombolan kami mabuk karena gembira," tulis Soewardi. "Mereka ingin agar wanita-wanita itu dibagi-bagi seperti membagi nasi bungkus." Tokoh Hadi sesungguhnya telah ingin memperkosa seorang di antaranya. Tapi Halimah, begitu perempuan itu memperkenalkan diri, ternyata adalah istri adiknya. Hasrat-birahinya yang telah sampai ke ubun-ubun surut seketika.

A.A. Navis dalam cerita pendek "Sang Guru Juki" (1990), juga berkisah tentang perlakuan buruk yang diterima perempuan. Mayor Ancok yang PRRI membiarkan anak buahnya memperkosa perempuan di desa-desa yang mereka duduki. "Apa salahnya bila anak buahku hanya memakai, bukan merampas perempuan itu?" alasan sang Mayor ketika berdebat dengan Si Dali, anak buahnya yang moralis, dalam sebuah kesempatan. Sang Mayor menganggap prajurit yang memperkosa sebagai "itulah risiko perang!"

Dalam perang, jika pun tidak menjadi sasaran perkosaaan, maka perempuan juga sering dijadikan 'ganjal batu'. Mereka hanya dipakai karena keadaan mendesak, setelah keadaan lapang mereka dibuang. Dalam cerita "Sang Guru Juki", misalnya, A.A. Navis bercerita, bahwa demi menyokong perlawanan dan mendukung perjuangan, Guru Juki memutuskan ikut bergerilya bersama pasukan pemberontak. Di pengungsian Guru Juki tinggal di rumah murid perempuannya bernama Siti. Terpisah berbulan-bulan dari istri (yang ditinggalkan di kota) membuat Guru Juki tidak tahan sendirian. Siti menjadi 'korban' pertama, dia dikawini Guru Juki, lalu ditinggalkan. Desa itu diserang tentara pusat, Guru Juki terpaksa mengungsi ke desa lain.

Di desa yang baru, Guru Juki tinggal di rumah seorang janda. Lalu kawin pula dengan si janda. "Dari pada ditangkap dan dipenjarakan musuh, biarlah ditangkap janda?" tutur Sang Guru, tulis Navis dengan satire. Desa itu pun diserang pula, Guru Juki melarikan diri lagi mengikuti kaum pemberontak, si janda tinggallah. Maka begitulah, di desa di mana Guru Juki 'terdampar', di sana pula dia akan beristri, dan meninggalkan mereka kelak.

Sementara itu, "Si Montok" (1990), cerpen A.A. Navis lain, menceritakan kisah seorang prajurit PRRI bernama Dali. Dia bersama 2 teman lain memperebutkan seorang janda cantik di desa yang mereka

duduki. Tiga prajurit ini berusaha merebut hati si Montok. Tapi ketiganya gagal. Komandan mereka yang datang kemudian-lah yang berhasil memperistri si Montok. "Engkau pasti akan jadi ganjal batu bila perang usai!" kata Dali pada si Montok sebelum desa tempat tinggalnya itu diserang Tentara Pusat.

PENUTUP

Perang PRRI itu pun usai pada 1961, ketika Soekarno menyerukan amnesti massal kepada setiap pemberontak yang mau menyerah . Atas seruan itu, kaum pemberontak yang tersisa memang memutuskan turun, meletakkan senjata, dipenjara beberapa lama, untuk kemudian dibebaskan. Lantas mereka sudah dapat berkumpul kembali dengan anak dan istri yang telah bertahun-tahun ditinggalkan. Begitupun dengan pasukan pemenang perang, setelah perang dinyatakan usai, mereka kembali ke Jawa dengan gagah. Sementara Si Montok, Siti, Si Janda, Si Lara, dan lain-lain itu, tokoh-tokoh fiksi sebagai representasi nasib perempuan-perempuan Minangkabau itu, akan punya nasibnya sendiri. Perempuan-perempuan yang telah besar perutnya itu terus berseru-seru ke arah kosong lautan: "Mas pendusta, Mas pendusta, ya!"

Sejarah tentang nasib perempuan-perempuan itu senyap. Tidak satu pun karya historiografi mengabarkannya, bahkan hingga akhir dekade pertama abad ke-21, setidak-tidaknya hingga Reni Nuryanti (2009) memulainya. Sejarah perempuan toh sejarah yang terpinggirkan dalam historiografi Indonesia pascakolonial (Bambang Purwanto 2006). Tetapi, jika sejarah tampak bungkam tentang hal tersebut, maka ternyata sastra membicarakannya dengan terbuka sudah sejak awal. Sudah sejak 1964, tiga tahun berselang setelah perang dinyatakan berakhir, melalui cerita-cerita Soewardi Idris, nasib perempuan-perempuan korban perang itu telah disuarakan. Lalu upaya itu terus berlanjut hingga dekade 1970an dan 1980an oleh pengarang-pengarang semacam A.A. Navis, Wildan Yatim, dan Makmur Hendrik; dan semakin semarak pasca-Reformasi oleh generasi-generasi yang bahkan tidak hidup pada zaman itu dan merasakan langsung peristiwa itu semacam Ragdi F. Daye, Zelfeni Wimra, bahkan Ayu Utami.

Gambaran-gambaran karya fiksi tersebut tentang nasib perempuan dalam huruhara PRRI itu nyaris memiliki satu pola belaka: Perempuan adalah korban dari perang laki-laki. 'Korban' dalam gambaran karya-karya fiksi itu dimaknai beragam, bisa dalam arti korban kejahatan seksual (berupa perkosaan dan pelecehan), bisa pula dalam pengertian korban bujukan laki-laki melalui perkawinan yang legal, yang setelah perang usai lantas ditinggalkan atau dibawa sebagai madu dari perempuan yang lain [sebagai ganjal kayu maupun batu]. Kejahatan itu, menurut karya-karya fiksi tersebut, dilakukan tidak hanya oleh kaum pemberontak, tetapi juga oleh tentara pendudukan.

DAFTAR BACAAN

A.A. Navis. *Hujan Panas dan Kabut Musim*. Djambatan. 1990.

A.A. Navis. *Saraswati si Gadis dalam Sunyi*. Gramedia. 1970.

Audrey Kahin. *Dari Pemberontakan ke Integrasi*. Yayasan Obor Indonesia. 2008.

Ayu Utami. *Cerita Cinta Enrico*. Gramedia. 2012

Bambang Purwanto. *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris*. Penerbit Ombak. 2006.

Carl Chairul. *Ketika Merah Putih Terkoyak*. Gramedia. 2001.

Christhoper Lloyd. *The Structure of History*. Cambridge. Blackwell. 1993

Gilbert J. Garaghan. *A. Guide to Historical Method*. Fordham University Press New York. 1984.

Gus Tf Sakai. *Ular Keempat*. Penerbit Buku Kompas. 2005.

Gusti Asnan. *Memikir Ulang Regionalsime: Sumatera Tahun 1950-an*. KITLV. NIOD. Yayasan Obor. 2007.

Hadi Soebadio, *Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/Permesta.* Gramedia Pustaka Utama. 2002.

James Mossman. "Jatuhnya Pemberontakan Sumatera" dalam Anthony Reid (editor). *Sumatera Tempo Doeloe (dari Marco Polo sampai Tan Malaka).* Komunitas Bambu Depok. 2010.

Jeffrey Hadler. *Muslims and matriarchs: cultural resilience in Indonesia through jihad and colonialism*. Ithaca, New York: Cornell. University Press. 2008. (Terjemahan dalam bahasa Indonesia diterbitkan tahun 2010 dengan judul *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Islam dan Kolonialisme di Minangkabau.* Jakarta: Freedom Institute).

Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah.* Tiara Wacana. 2003.

Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah.* Penterjemah Nugroho Notosusanto. Universitas Indonesia Press. 1985.

Makmur Hendrik. *Tikam Samurai.* CV. Pena Emas. 1983.

Melani Budianta. "Budaya, Sejarah & Pasar: New Historisisme dalam Perkembangan Kritik Sastra", *Jurnal Susastra*, Vol 2, No 3, Tahun 2006.

Mestika Zed, Edi Utama dan Hasril Chaniago*, Sumatra Barat di Panggung Sejarah 1945-1950*. Sinar Harapan. 1998.

Midawati & Amriah Buang. "Keusahawanan peniaga wanita Minangkabau". *Geografia Online, Malaysia Journal of Society and Space,* 10 issue 5, , h. 188-202. 2014.

Ragdi F. Daye. *Perempuan Bawang dan Lelaki Kayu*. Lingkar Pena Publishing House. 2010.

Reni Nuryanti. "Hidup di Zaman Bergolak; Perempuan Minangkabau pada Masa Pergolakan Daerah (1956-1961)". *Tesis.* (S2). Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2014.

Reni Nuryanti. "Perempuan, Seks, dan Perang: Analisis Dalam Pergolakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) (1958-1961)". *Proceedings.* BPSNT Padang Press dan Fakultas Sastra Unand. 2011.

Reni Nuryanti. *Perempuan Berselimut Konflik.* Tiara Wacana. 2011.

Sartono Kartodirdjo. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah.* Gramedia. 1993.

Selfi Mahat Putri. "Perempuan dan Modernitas: Perubahan Adat Perkawinan Minangkabau pada Awal Abad ke-20". *Tesis* (S2). Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2014.

Seno Gumira Adjidarma. *Ketika Jurnalisme Dibungkam Sastra Harus Bicara*. Bentang. 2008.

Seno Gumira Ajidarman (editor). *Dua Kelamin Midin: Cerpen Kompas Pilihan 1970-1980*. Penerbit Buku Kompas. 2003.

The Birth of New Indonesia (Six Months P.R.R.I), Commemoration Monograph Genesis and Development of the Revolutionary Goverament of the Republic of Indonesia. Cornell University Library, *PamphletDS Indonesia No. 179.*

Wildan Yatim. *Pergolakan*. Pustaka Jaya. 1974.

Yenny Narny. "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Tragedi Nasional tahun 1965/1966 di Sumatra Barat" dalam Taufik Abdullah & Sukri Abdurrachman (editor). *Indonesia Across Orders: Arus Bawah Sejarah Bangsa (1930-1960).* LIPI Press. 2011.

Zelfeni Wimra. *Pengantin Subuh*. Lingkar Pena Publishing House. 2009.

Zurneli Zubir. *Dari Pingitan Hingga Karier: Perjalanan Tokoh Perempuan Minangkabau Menentang Tradisi*. Eja Publisher. 2011.

BIODATA PENULIS

Dedi Arsa (Deddy Arsya), lahir di Bayang, Sumatera Barat, 15 Desember 1987. Buku terbarunya berjudul *Mendisiplinkan Kawula Jajahan: Politik Penjara Hindia Belanda* (2017), *Radjab Syamsudin Si Penabuh Dulang* (2017), dan *Penyair Revolusioner* (2017). Sekarang tinggal di Pandai Sikek, Tanah Datar, Sumatera Barat. Dia dapat dihubungi melalui: deddyarsya1987@gmail.com dan 085263940425